



PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA SEPTEMBER 2016

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEPTEMBER 2016 SEBESAR 10,70 PERSEN

- ☑ Pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen).
- ☑ Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016.
- ☑ Meski selama periode Maret 2016–September 2016 persentase kemiskinan menurun, namun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,39 juta orang (dari 17,67 juta orang pada Maret 2016 menjadi 17,28 juta orang pada September 2016).
- ☑ Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2016 tercatat sebesar 73,19 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2016 yaitu sebesar 73,50 persen.
- ☑ Jenis komoditi makanan yang berpengaruh terbesar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, di antaranya adalah beras, rokok, daging sapi, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah dan tempe. Munculnya daging sapi sebagai salah satu komoditi penyumbang terbesar Garis Kemiskinan disebabkan pada periode September 2016 bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang terbesar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, dan pendidikan.

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan September 2015–September 2016

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016, maka selama enam bulan tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,25 juta orang. Sementara apabila dibandingkan dengan September tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 0,75 juta orang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2016–September 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,15 juta sebaliknya daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,39 juta orang.

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, September 2015–September 2016

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
September 2015	10,62	8,22
Maret 2016	10,34	7,79
September 2016	10,49	7,73
<u>Perdesaan</u>		
September 2015	17,89	14,09
Maret 2016	17,67	14,11
September 2016	17,28	13,96
<u>Total</u>		
September 2015	28,51	11,13
Maret 2016	28,01	10,86
September 2016	27,76	10,70

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2015, Maret 2016 dan September 2016

Beberapa faktor yang terkait dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2016–September 2016 antara lain adalah:

- a. Selama periode Maret 2016–September 2016 terjadi inflasi umum relatif rendah yaitu tercatat sebesar 1,34 persen.
- b. Pada periode Maret 2016–September 2016, secara nasional harga eceran beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras mengalami penurunan. Rata-rata harga beras turun 1,21 persen yaitu dari Rp13.301,00 per kg pada Maret 2016 menjadi Rp13.140,00 per kg pada September 2016. Rata-rata harga cabai merah mengalami penurunan sebesar 14,06 persen yaitu dari Rp45.554,00 per kg pada Maret 2016 menjadi Rp39.151,00 per kg pada September 2016. Adapun cabai rawit mengalami penurunan sebesar 13,77 persen dan telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 0,56 persen.
- c. Nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada September 2016 naik sebesar 1,42 persen dibanding upah buruh tani per hari Maret 2016, yaitu dari Rp47.559,00 menjadi Rp48.235,00. Selain itu rata-rata upah buruh bangunan per hari pada September 2016 naik sebesar 1,23 persen dibanding upah buruh tani per hari Maret 2016, yaitu dari Rp81.481,00 menjadi Rp82.480,00.
- d. NTP nasional September 2016 sebesar 102,02 atau naik 0,69 persen dibanding NTP bulan Maret 2016 yang sebesar 101,32.

2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Pada September 2016

Tabel 2 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut pulau pada September 2016. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 21,98 persen, sementara persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,45 persen.

Tabel 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2016

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	2,06	4,15	6,21	9,07	12,36	11,03
Jawa	7,04	7,79	14,83	7,72	13,94	10,09
Bali dan Nusa Tenggara	0,59	1,53	2,11	9,89	18,11	14,72
Kalimantan	0,28	0,69	0,97	4,35	8,07	6,45
Sulawesi	0,39	1,70	2,09	5,75	13,84	10,97
Maluku dan Papua	0,12	1,42	1,55	5,51	29,61	21,98
Indonesia	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016.

Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (14,83 juta orang); sementara jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,97 juta orang).

3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 1998–September 2016

Secara umum, pada periode 1998–September 2016 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan kecuali pada tahun 2006, September 2013, dan Maret 2015. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2006 berturut-turut adalah sebesar 39,30 juta atau 17,75 persen. Jumlah dan persentase tersebut lebih tinggi dibanding kondisi kemiskinan tahun 2005 yang sebesar 35,10 juta penduduk miskin (15,97 persen). Hal ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Begitu pula dengan kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin September 2013 dibanding Maret 2013 juga disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada bulan Juni 2013. Pada Maret 2015 persentase penduduk miskin sedikit mengalami kenaikan dibandingkan September 2014 dan mulai Maret 2015 hingga September 2016 tercatat baik jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2010 sampai dengan September 2016 ditunjukkan oleh Grafik 1.

Grafik 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2010–2016



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Catatan: Maret 2011–September 2013 merupakan *backcasting* dari penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010

4. Perubahan Garis Kemiskinan September 2015–September 2016

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2015 sampai September 2016.

Tabel 3
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, September 2015–September 2016

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2015	247 840	108 538	356 378
Maret 2016	255 181	109 346	364 527
September 2016	259 886	112 228	372 114
Perubahan Sept'15–Sept'16 (%)	4,86	3,40	4,42
Perubahan Mar'16 –Sept'16 (%)	1,84	2,64	2,08
Perdesaan			
September 2015	256 120	76 914	333 034
Maret 2016	266 132	77 514	343 646
September 2016	270 038	80 382	350 420
Perubahan Sept'15–Sept'16 (%)	5,43	4,51	5,22
Perubahan Mar'16 –Sept'16 (%)	1,47	3,70	1,97
Total			
September 2015	251 943	92 866	344 809
Maret 2016	260 469	93 917	354 386
September 2016	264 941	97 050	361 990
Perubahan Sept'15–Sept'16 (%)	5,16	4,51	4,98
Perubahan Mar'16 –Sept'16 (%)	1,72	3,34	2,15

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2015, Maret 2016, dan September 2016

Selama periode Maret 2016 –September 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,15 persen, yaitu dari Rp354.386,00 per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp361.990,00 per kapita per bulan pada September 2016. Sementara pada periode September 2015–September 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,98 persen, yaitu dari Rp344.809,00 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp361.990,00 per kapita per bulan pada September 2016.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2016 sebesar 73,19 persen.

Tabel 4
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap
Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2016

Jenis komoditi (1)	Perkotaan (2)	Jenis komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan:	69,84	Makanan:	77,06
Beras	18,31	Beras	25,35
Rokok	10,70	Rokok	10,70
Daging sapi	4,98	Daging sapi	3,47
Telur ayam ras	3,18	Gula pasir	3,01
Daging ayam ras	3,10	Telur ayam ras	2,76
Mie instan	2,43	Mie instan	2,28
Gula pasir	2,02	Daging ayam ras	2,19
Bawang merah	1,77	Bawang merah	2,10
Tempe	1,62	Kopi bubuk & kopi instan	1,58
Tahu	1,57	Tempe	1,53
Makanan Lainnya	20,16	Makanan Lainnya	22,09
Bukan Makanan:	30,16	Bukan Makanan:	22,94
Perumahan	9,81	Perumahan	7,63
Listrik	2,86	Bensin	2,31
Bensin	2,84	Listrik	1,59
Pendidikan	2,49	Pendidikan	1,49
Angkutan	1,70	Perlengkapan mandi	1,04
Perlengkapan mandi	1,28	Kayu bakar	0,90
Bukan Makanan Lainnya	9,18	Bukan Makanan Lainnya	7,98
Total	100,00	Total	100,00

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016

Pada September 2016, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama, yaitu beras yang memberi sumbangan sebesar 18,31 persen di perkotaan dan 25,35 persen di perdesaan. Rokok memberikan sumbangan terbesar ke dua terhadap GK perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 10,70 persen. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada September 2016 terdapat daging sapi dalam komoditi sepuluh besar

penyumbang GK, yang memberikan sumbangan 4,98 persen untuk GK perkotaan dan 3,47 persen untuk GK perdesaan. Munculnya komoditi daging sapi disebabkan pada periode September 2016 bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,18 persen di perkotaan dan 2,76 persen di perdesaan), mie instan (2,43 persen di perkotaan dan 2,28 di perdesaan), dan seterusnya. Selain itu, dari Tabel 4 terlihat pula bahwa terdapat komoditi penyumbang terbesar GK yang berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Komoditi tahu hanya menjadi penyumbang GK perkotaan dan komoditi kopi bubuk & kopi instan hanya menjadi penyumbang GK perdesaan.

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Sementara itu terdapat komoditi bukan makanan lainnya yang memberi sumbangan berbeda pada GK di perkotaan dan perdesaan, yaitu angkutan yang hanya memberi sumbangan besar terhadap GK di perkotaan sebesar 1,70 persen dan kayu bakar yang hanya memberi sumbangan besar terhadap GK perdesaan sebesar 0,90 persen.

5. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2016–September 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2016 adalah 1,94 dan pada September 2016 mengalami penurunan menjadi 1,74 demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,52 menjadi 0,44 pada periode yang sama (Tabel 5). Apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu September 2015–September 2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) cenderung mengalami penurunan.

Tabel 5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia
Menurut Daerah, September 2015– September 2016

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
September 2015	1,29	2,40	1,84
Maret 2016	1,19	2,74	1,94
September 2016	1,21	2,32	1,74
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)			
September 2015	0,35	0,67	0,51
Maret 2016	0,27	0,79	0,52
September 2016	0,29	0,59	0,44

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2015, Maret 2016 dan September 2016

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2016, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) untuk daerah perkotaan sebesar 1,21 sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,32. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) untuk perkotaan adalah 0,29 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,59.

6. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

- Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan, Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
- Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan September 2016 adalah data Susenas bulan September 2016. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKGD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

Tabel 6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi September 2015–Maret 2016

Kode	Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)						Persentase Penduduk Miskin (%)					
		Perkotaan		Perdesaan		Total		Perkotaan		Perdesaan		Total	
		Mar'16	Sep'16	Mar'16	Sep'16	Mar'16	Sep'16	Mar'16	Sep'16	Mar'16	Sep'16	Mar'16	Sep'16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	Aceh	159,50	163,02	688,94	678,29	848,44	841,31	10,82	10,79	19,15	18,80	16,73	16,43
12	Sumatera Utara	690,80	690,34	765,15	762,21	1 455,95	1 452,55	9,75	9,69	10,97	10,86	10,35	10,27
13	Sumatera Barat	118,96	119,51	252,59	257,00	371,55	376,51	5,54	5,52	8,16	8,27	7,09	7,14
14	Riau	162,45	164,12	352,95	337,47	515,40	501,59	6,40	6,38	9,00	8,51	7,98	7,67
15	Jambi	115,35	116,33	174,46	174,48	289,81	290,81	10,86	10,73	7,32	7,30	8,41	8,37
16	Sumatera Selatan	374,53	377,88	726,67	718,62	1 101,20	1 096,50	12,74	12,73	13,99	13,77	13,54	13,39
17	Bengkulu	97,34	98,07	231,27	227,53	328,61	325,60	16,19	16,16	17,85	17,43	17,32	17,03
18	Lampung	233,39	227,44	936,21	912,34	1 169,60	1 139,78	10,53	10,15	15,69	15,24	14,29	13,86
19	Kepulauan Bangka Belitung	19,63	19,37	53,13	51,70	72,76	71,07	2,78	2,67	7,72	7,57	5,22	5,04
21	Kepulauan Riau	87,78	86,19	32,63	32,95	120,41	119,14	5,16	4,99	10,43	10,47	5,98	5,84
31	DKI Jakarta	384,30	385,84	-	-	384,30	385,84	3,75	3,75	-	-	3,75	3,75
32	Jawa Barat	2 497,59	2 543,30	1 726,73	1 624,81	4 224,32	4 168,11	7,67	7,55	11,80	11,72	8,95	8,77
33	Jawa Tengah	1 824,08	1 879,55	2 682,81	2 614,20	4 506,89	4 493,75	11,44	11,38	14,89	14,88	13,27	13,19
34	DI Yogyakarta	297,71	301,25	197,23	187,58	494,94	488,83	11,79	11,68	16,63	16,27	13,34	13,10
35	Jawa Timur	1 518,79	1 552,77	3 184,51	3 085,76	4 703,30	4 638,53	7,94	7,91	16,01	15,83	12,05	11,85
36	Banten	377,10	380,16	281,01	277,58	658,11	657,74	4,51	4,49	7,45	7,32	5,42	5,36
51	Bali	96,98	93,74	81,20	81,20	178,18	174,94	3,68	3,53	5,23	5,21	4,25	4,15
52	Nusa Tenggara Barat	385,22	378,83	419,23	407,75	804,45	786,58	18,20	17,55	15,17	14,82	16,48	16,02
53	Nusa Tenggara Timur	112,02	112,48	1 037,90	1 037,60	1 149,92	1 150,08	10,58	10,17	25,17	25,19	22,19	22,01
61	Kalimantan Barat	78,29	75,98	303,06	314,34	381,35	390,32	5,16	4,97	9,11	9,38	7,87	8,00
62	Kalimantan Tengah	41,07	40,61	102,42	96,85	143,49	137,46	4,60	4,49	6,23	5,83	5,66	5,36
63	Kalimantan Selatan	60,83	60,90	134,87	123,26	195,70	184,16	3,48	3,43	5,89	5,37	4,85	4,52
64	Kalimantan Timur	88,04	89,64	124,88	121,60	212,92	211,24	3,93	3,86	10,05	10,15	6,11	6,00
65	Kalimantan Utara	14,21	17,25	26,91	29,78	41,12	47,03	3,78	4,50	9,47	10,29	6,23	6,99
71	Sulawesi Utara	60,62	59,73	142,20	140,62	202,82	200,35	5,34	5,22	10,97	10,82	8,34	8,20

72	Sulawesi Tengah	75,45	75,90	345,07	337,25	420,52	413,15	10,18	10,07	15,91	15,48	14,45	14,09
73	Sulawesi Selatan	149,13	150,60	657,90	646,21	807,03	796,81	4,51	4,47	12,46	12,30	9,40	9,24
74	Sulawesi Tenggara	51,01	53,18	275,86	274,11	326,87	327,29	6,74	6,87	15,49	15,31	12,88	12,77
75	Gorontalo	24,08	24,02	179,11	179,67	203,19	203,69	5,84	5,78	24,41	24,30	17,72	17,63
76	Sulawesi Barat	22,85	25,07	129,88	121,83	152,73	146,90	8,59	8,43	12,56	12,00	11,74	11,19
81	Maluku	52,08	54,24	275,64	277,55	327,72	331,79	7,66	7,86	26,82	26,88	19,18	19,26
82	Maluku Utara	10,57	12,45	64,10	63,95	74,67	76,40	3,32	3,76	7,44	7,43	6,33	6,41
91	Papua Barat	20,96	20,11	204,85	203,49	225,81	223,60	6,14	5,69	37,48	37,33	25,43	24,88
94	Papua	37,08	35,77	874,25	879,10	911,33	914,87	4,42	4,21	37,14	37,07	28,54	28,40
Indonesia		10 339,79	10 485,64	17 665,62	17 278,68	28 005,41	27 764,32	7,79	7,73	14,11	13,96	10,86	10,70

Tabel 7
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah Maret 2016–September 2016

Kode	Propinsi	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)					
		Perkotaan		Perdesaan		Total	
		Mar'16	Sep'16	Mar'16	Sep'16	Mar'16	Sep'16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Aceh	427 970	445 488	403 985	415 826	410 956	424 765
12	Sumatera Utara	398 408	413 835	377 748	388 707	388 156	401 832
13	Sumatera Barat	441 523	454 674	413 790	425 520	425 141	438 075
14	Riau	426 346	439 542	425 777	433 960	426 001	437 259
15	Jambi	438 600	448 615	342 137	349 735	371 875	379 648
16	Sumatera Selatan	388 060	400 159	331 570	339 874	351 984	361 696
17	Bengkulu	430 572	458 435	409 863	427 315	416 427	437 184
18	Lampung	392 488	398 378	354 678	357 792	364 922	368 592
19	Kepulauan Bangka Belitung	521 773	553 681	546 998	573 582	534 229	564 391
21	Kepulauan Riau	494 418	505 980	466 989	481 687	490 157	502 653
31	DKI Jakarta	510 359	520 690	-	-	510 359	520 690
32	Jawa Barat	325 017	332 145	324 937	331 237	324 992	332 119
33	Jawa Tengah	315 269	322 799	319 188	322 489	317 348	322 748
34	DI Yogyakarta	364 786	370 510	331 308	337 230	354 084	360 169
35	Jawa Timur	319 662	329 241	323 779	328 846	321 761	329 172
36	Banten	377 052	382 903	347 765	351 708	367 949	373 365
51	Bali	348 571	357 427	322 660	328 033	338 967	346 398
52	Nusa Tenggara Barat	343 580	346 581	326 656	328 775	333 996	336 573
53	Nusa Tenggara Timur	386 139	389 661	306 721	310 296	322 947	327 003
61	Kalimantan Barat	353 143	366 477	345 480	360 940	347 880	363 027
62	Kalimantan Tengah	348 254	357 224	387 202	392 543	373 484	380 524
63	Kalimantan Selatan	386 462	399 162	370 612	380 647	377 480	389 273
64	Kalimantan Timur	519 653	535 137	495 975	510 041	511 205	526 686

65	Kalimantan Utara	523 914	539 499	499 980	518 305	513 614	530 566
71	Sulawesi Utara	312 328	314 004	321 985	322 366	317 478	318 984
72	Sulawesi Tengah	391 070	399 413	370 392	376 658	375 659	382 775
73	Sulawesi Selatan	281 676	286 669	263 674	267 428	270 601	275 361
74	Sulawesi Tenggara	289 827	294 286	271 961	276 978	277 288	282 161
75	Gorontalo	284 308	287 156	284 190	285 999	284 232	286 968
76	Sulawesi Barat	273 224	280 117	290 340	295 739	286 840	292 519
81	Maluku	412 980	424 788	415 177	423 698	414 302	424 656
82	Maluku Utara	390 788	405 368	371 289	379 454	376 554	386 489
91	Papua Barat	487 727	508 262	466 996	480 945	474 967	492 969
94	Papua	466 985	479 294	412 991	425 264	427 176	440 021
Indonesia		364 527	372 114	343 647	350 420	354 386	361 990